

Tiga Tahun IBI

DESEMBER lalu, usia Ikatan Bankir Indonesia (IBI) genap tiga tahun. Meski usia asosiasi bankir yang berdiri pada 12 Desember 2005 ini masih tergolong muda, embrionya sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya. Seperti diketahui, IBI merupakan hasil merger Banker's Club Indonesia (BCI) yang berdiri sejak 1976 dan Institut Bankir Indonesia yang hadir sejak 1992. Kesamaan visi membuat keduanya bergabung dengan nama baru, yakni Ikatan Bankir Indonesia.

Sebagai asosiasi profesi, banyak ekspektasi anggota yang disandarkan pada IBI. Apalagi, lembaga ini memang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan bankir dalam tata kelola perusahaan.

Untuk menggapai harapan itu, selama tiga tahun ini IBI menggelar pelbagai program kerja. Misalnya, sertifikasi bagi para bankir anggota. Dalam hal ini, IBI hanya bertindak sebagai pelopor, sementara pelaksana sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

Sesuai kajian IBI, ada 12 bidang kerja di sektor perbankan. Ke 12 bidang kerja itu adalah *risk management, internal audit, treasury dealer, wealth management, operation, credit, finance, funding and services, sales and marketing, human resources, information technology, dan legal and compliance*. IBI merekomendasikan bahwa bankir yang bekerja di bidang kerja tersebut sebaiknya bersertifikat.

Hingga kini, dari 12 bidang kerja itu, baru empat bidang kerja yang memperoleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Empat bidang kerja tersebut adalah *treasury dealer, internal audit, wealth management, dan risk management*.

Dalam pelaksanaan sertifikasi, IBI menggandeng beberapa asosiasi profesi. Asosiasi tersebut, antara lain Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Indonesia Risk Professional Association (IRPA), Certified Wealth Managers Association (CWMA), Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), dan Banker Association for Risk Management (BARa).

Pelbagai sertifikasi profesi ini dipandang perlu mengingat tantangan industri perbankan ke depan makin besar. Selain itu, persaingan bisnis, baik dengan bank luar negeri maupun sesama bank di dalam negeri, tak bisa dihindarkan.

Dalam konteks ini, IBI ingin membangun suasana persaingan bisnis antarbankir yang *fair*. Kendati persaingan dalam hal *funding dan lending* berlangsung ketat di lapangan, jangan sampai persaingan itu membuat pelaku bisnis perbankan saling menjatuhkan. Sebab, bila satu bank terkena masalah, efeknya akan dirasakan bank lain.

IBI juga telah mendirikan komisariat di Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Hal itu dilakukan IBI agar bankir-bankir di daerah bisa satu langkah dalam membangun kompetensi, profesionalisme, dan kesetaraan. Di sisi lain, hadirnya komisariat IBI di daerah menjadikan eksistensi bankir-bankir di daerah makin diakui dan komunikasi antarbankir pun makin cair.

Selain membangun kompetensi, keinginan lain yang tengah diperjuangkan IBI adalah membangun kesetaraan profesi. Ini merupakan modal para bankir untuk menghadapi pasar global. IBI juga berusaha menjadi mitra Bank Indonesia (BI) dalam membangun industri perbankan yang kuat, sehat, dan dinamis. Karena itu, IBI ikut andil dalam membangun kepercayaan terhadap industri perbankan.

Hal ini bisa kita lihat ketika industri keuangan mengalami masalah akibat *subprime mortgage*. IBI bekerja sama dengan Perbanas menghadirkan Erry Firmasyah, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk menjelaskan dan membeberkan secara gamblang kondisi riil yang terjadi di bursa, termasuk menepis rumor yang menambah ketidakpastian suasana.

Barangkali, apa yang dilakukan IBI selama tiga tahun belum sepenuhnya menyentuh keinginan semua anggota. Namun, secara bertahap, apa yang dicita-citakan anggota bakal direalisasikan. Untuk itu, dukungan aktif para anggota IBI diperlukan agar asosiasi bankir ini mampu berkiprah lebih baik di masa mendatang. Apalagi, ke depan, negeri ini memerlukan bankir yang memiliki integritas baik, kapabilitas tinggi, profesional, serta berwawasan dan bermental global. □

Penerbit: Ikatan Bankir Indonesia (IBI), **Pelindung:** Agus Martowardojo, **Pemimpin Redaksi:** Winny E. Hassan, **Anggota Redaksi:** Sukatmo Padmosukarso, Farid Rahman, Gus Irawan Pasaribu, Roosniati Salihin, Iqbal Latanro, Gayatri Rawit Angreni, **Sirkulasi dan Iklan:** Martono Soeprapto, **Konsultan:** PT Infoarta Pratama, **Alamat Redaksi dan Iklan:** Mandiri Tower Lantai 9, Bapindo Plaza, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54- 55, Jakarta 12190 **Telepon:** (021) 5267306, 5267375, **Faksimile:** (021) 5278690. **Website:** www.bankir-indonesia.org. **E-mail:** bankir.indonesia@prima.net.id

Redaksi menerima tulisan dari anggota Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Panjang setiap tulisan 3.000-7.500 karakter.

▼ Dari Redaksi

Tiga Tahun IBI 1

▼ Liputan Utama

Blanket Guarantee Agar Dana Tak Lari ke Luar Negeri 3

Keinginan menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh (*blanket guarantee*) terus menguat di kalangan perbankan. Kebijakan ini bisa membatasi suku bunga simpanan dan melindungi dana nasabah agar tidak lari ke luar negeri.

Penjaminan Simpanan Menyelamatkan Likuiditas dan Rupiah 6



Tarif Iklan

- Cover II: Rp6 juta
- Cover III: Rp8 juta
- Cover IV: Rp10 juta
- Iklan 1 halaman dalam berwarna Rp5 juta.
- Iklan 1 halaman dalam hitam putih Rp4 juta.
- Iklan ½ halaman dalam berwarna Rp3 juta.
- Iklan ½ halaman dalam hitam putih Rp2,5 juta.
- Iklan pariwisata/advertorial ditambah biaya produksi sebesar 25% dari harga iklan yang dipilih pemasang iklan
- Harga belum termasuk pajak
- Pemasang iklan dapat menghubungi Maisari (0812 848 6093) atau Kyosi Saneaya (0812 9975 015)

Pemerintah belum mau memberlakukan *blanket guarantee*. Padahal, selain untuk menambah kepercayaan, kebijakan ini dapat memengaruhi suku bunga simpanan dan nilai tukar rupiah. FPD dinilai bisa menjadi penggantinya.

▼ Profil

Sentot A. Sentausa
Sertifikasi,
License to Work 8

Sertifikasi manajemen risiko yang sudah berjalan saat ini belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan bankir. Padahal, sertifikasi merupakan *license to work* yang harus mampu memenuhi tiga aspek sertifikasi, yakni *knowledge, skill, dan attitude*.

▼ Tingkap 10

▼ Info IBI

Kembangkan Profesionalisme Bankir Surabaya dan Jawa Timur 13



Setelah Yogyakarta dan Medan, IBI kembali mendirikan kantor komisariatnya di Surabaya, Desember lalu. Seperti dua kota sebelumnya, tujuan pendirian IBI Komisariat Surabaya adalah membangun kompetensi dan integritas bankir daerah.

▼ Opini

Perlu Sinergi di Tengah Resesi 14

Ketika krisis global mulai menalar, sektor ekspor dan impor menurun. Pendapatan devisa pun berkurang. Pemerintah berusaha menjaga *market* yang ada dan membuka akses pasar baru.



▼ Info IBI

Tiga Tahun IBI Membangun Kompetensi Sejak Dini 17

Meski baru berumur tiga tahun, kiprah IBI tak diragukan lagi. Di usianya yang masih tergolong dini, IBI telah memayungi empat organisasi yang berperan penting dalam pembangunan kompetensi bankir Indonesia.

▼ Zona 18

▼ Lensa 20

▼ Life Style

Pesona Rumah Alam Sang Maestro Keramik 22

Kemana Anda akan pergi akhir pekan ini? Daripada jalan-jalan ke mal atau ke bioskop lebih baik pergi ke Rumah Keramik F. Widayanto. Selain dapat belajar membuat keramik, di tempat ini Anda akan dibuati keindahan alam.

▼ Tajuk 24

Majalah *Media Bankir* ini disponsori oleh

Blanket Guarantee Agar Dana Tak Lari ke Luar Negeri



Pelayanan nasabah korporasi; perlu meyakinkan nasabah

Keinginan menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh (*blanket guarantee*) terus menguat di kalangan perbankan. Kebijakan ini bisa membatasi suku bunga simpanan dan melindungi dana nasabah agar tidak lari ke luar negeri. A. Ikhsan

▶▶ KRISIS keuangan global tengah melanda dunia. Beberapa negara pun melakukan langkah antisipasi agar efek krisis tidak melebar dan berdampak lebih parah, khususnya di sektor keuangan. Langkah itu ditempuh agar krisis tidak mengganggu stabilitas di sektor keuangan, khususnya perbankan.

Bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini, baik pemerintah (Departemen Keuangan) maupun Bank Indonesia (BI) cukup intens menjaga kestabilan sektor keuangan di Indonesia. Beberapa kebijakan pun diteken pemerintah dan BI untuk meminimalkan efek krisis.

Salah satu instrumen yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor keuangan adalah kebijakan menaikkan nilai maksimum penjaminan dana simpanan masyarakat.

Sebelumnya, dana yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya maksimal Rp100 juta. Kemudian, nilainya dinaikkan menjadi maksimal Rp2 miliar. Tapi, penjaminan hingga maksimal Rp2 miliar dinilai belum cukup untuk mencegah *capital outflow*. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan *blanket guarantee* (penjaminan penuh).

Kalangan perbankan berharap, pemerintah bersedia menerapkan kebijakan *blanket guarantee* untuk lebih menjaga kepercayaan nasabah, terutama pemilik dana Rp2 miliar ke atas. Selain itu, untuk mengantisipasi agar pemilik dana di atas Rp2 miliar tidak mengalihkan dananya ke luar negeri. Karena, selain memicu *capital outflow*, hal itu akan makin memperlemah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Apalagi,

dana yang dimiliki nasabah di atas Rp2 miliar nilainya diprediksi mencapai Rp600 triliun.

Penerapan *blanket guarantee* memang masih jadi agenda yang belum terealisasi. Tapi, ini dinilai sebagai langkah kontekstual untuk menghadapi kondisi ekonomi 2009. Lebih konkret lagi, langkah itu dianggap mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2009 yang diramalkan hanya bisa tumbuh maksimal 5,5%.

Terkait dengan keinginan pelaku perbankan agar *blanket guarantee* diterapkan, Agus Martowardojo, Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI), mengingatkan pemerintah agar jangan terlalu percaya diri dengan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia saat ini, yang salah satu indikatornya adalah cadangan devisa sebesar US\$57 miliar. "Negara sekelas Singapura dan Malaysia yang memiliki cadangan devisa di atas US\$100 miliar saja menempuh langkah ini," tukas Agus.

Menurut Agus, penjaminan dana nasabah secara penuh akan memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Bahkan, bila kebijakan itu diperluas ke pasar uang antarbank (PUAB), kepercayaan antarbank untuk melakukan pinjaman di tengah krisis likuiditas pun bakal pulih.

Dengan demikian, *blanket guarantee* penting diterapkan sebagai bagian dari standar baku dalam menyikapi krisis keuangan. Terlebih, AS, Eropa, Malaysia, dan Singapura telah memberlakukan kebijakan ini.

Kalau ditelusuri ke belakang, kenaikan maksimum penjaminan simpanan dimulai AS. Negara ini menaikkan nilai penjaminan simpanan nasabah dari US\$100.000 menjadi US\$250.000.

Sebagian besar negara Uni Eropa, yang semula hanya membatasi maksimal penjaminannya sebesar 20.000 euro, pun melakukannya. Italia menaikkan hampir lima kali lipat, yakni menjadi 103.291 euro, Prancis menjadi 70.000 euro, Inggris menjadi 64.615 euro, serta Belgia dan Belanda yang masing-masing menjadi 40.000 euro. Setiap negara tentunya memiliki pertimbangan sendiri mengenai besaran kenaikan batasan penjaminannya.

Irlandia, Jerman, Austria, dan Denmark sudah lebih dulu memberlakukan *blanket guarantee*. Kemudian, disusul Australia, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Tak ketinggalan, Indonesia. Negara ini telah menaikkan nilai penjaminan simpanan sebesar 20 kali lipat, dari semula Rp100 juta menjadi Rp2 miliar.

Pemberlakuan *blanket guarantee* atau penjaminan penuh seluruh simpanan tanpa

batas ini penting dilakukan. Karena, dalam praktiknya, kebijakan penjaminan simpanan sampai dengan maksimal Rp2 miliar ternyata mengundang kerawanan. Akibat kebijakan itu, dana nasabah sebesar Rp602,76 triliun atau sekitar 39,33% dari total dana pihak ketiga (DPK) tidak terjamin. Dari jumlah itu, sekitar 50% berasal dari penyimpan individual dalam bentuk deposito satu bulan.

Banyak kajian yang memberikan rekomendasi bahwa pemberlakuan *blanket guarantee* tidak berdiri sendiri. Pada saat



Agus Martowardojo; memberikan kenyamanan

Penerapan *blanket guarantee* memang masih jadi agenda yang belum terealisasi. Tapi, ini dinilai sebagai langkah kontekstual untuk menghadapi kondisi ekonomi 2009. Lebih konkret lagi, langkah itu dianggap mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2009 yang diramalkan hanya bisa tumbuh maksimal 5,5%.

blanket guarantee diberlakukan, harus ada kebijakan ikutan. Karena, selain akan mengurangi disiplin pasar, pemberlakuan *blanket guarantee* bakal meningkatkan *moral hazard*. Dari sisi disiplin pasar, pihak bank akan cenderung meningkatkan daya tarik produk simpanan dengan cara menaikkan suku bunga yang jauh berbeda dengan tingkat bunga di pasar.

Agus menilai, kendati penerapan *blanket guarantee* bisa menimbulkan ketidaksihonestan pasar dan *moral hazard*, bukan berarti ini

adalah kebijakan yang salah. "Dalam kaitan ini, saya menggunakan analogi kalau yang melakukan *moral hazard* adalah hanya segelintir oknum nasabah dan atau oknum dari bank saja. Bukan berarti, banknya tidak diperlukan dan lantas nasabahnya tidak dilindungi. Bagaimanapun, *moral hazard* dapat diatasi melalui berbagai regulasi dan pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang efektif serta adanya disiplin pengawasan," kilah Agus, yang juga Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Karena itu, seharusnya tak ada lagi keraguan pemerintah untuk memberlakukan *blanket guarantee* dalam jangka waktu tertentu. Pertimbangan yang dapat digunakan adalah pemberlakuan kebijakan itu akan menciptakan kondisi *leveling field* yang sama antara perbankan Indonesia dengan negara tetangga yang sudah menerapkan *blanket guarantee* terlebih dulu.

Apalagi, saat ini, negara tetangga sudah menjadikan *blanket guarantee* sebagai daya tarik. Mereka secara terang-terangan menawarkannya kepada sebagian besar penyimpan di Indonesia.

Sulit dibayangkan jika perpindahan simpanan dari perbankan Indonesia ke negara tetangga benar-benar terjadi dalam suasana ketatnya likuiditas. Indonesia akan mengalami percepatan krisis yang seharusnya tak perlu terjadi. Kalau sudah begitu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) akan sulit difungsikan secara optimal.

Selain itu, kondisi perbankan saat ini jauh berbeda dengan kondisi sebelum krisis 1997. Telah banyak regulasi yang dikeluarkan BI berkaitan dengan penerapan GCG, sehingga peluang untuk melakukan *moral hazard* makin kecil.

Belum lagi, pengelolaan pengawasannya superketat, sehingga sangat mudah bagi BI untuk mendeteksi ada tidaknya masalah pada sebuah bank. Dengan begitu, kekhawatiran akan adanya *moral hazard* akibat pemberlakuan *blanket guarantee* tampaknya kurang relevan.

Keputusan pelaksanaan penjaminan penuh sebetulnya ada pada pemerintah. Karena, bagaimanapun, uang yang digunakan untuk menjamin simpanan adalah uang pemerintah. Tapi, kalau kemudian kejadiannya berbeda, tentu saja selalu ada alasan-alasannya. Misalnya, kenapa sekarang penjaminan simpanan hanya sampai dengan Rp2 miliar.

Muliawan D. Hadad, Deputy Gubernur BI, mengatakan bahwa peraturan pemerintah mengenai penjaminan simpanan hingga



Perbankan di Inggris; menaikkan batas penjaminan

Rp2 miliar sudah dinilai cukup beralasan. Artinya, penjaminan yang ada sekarang sudah dinilai cukup. Hanya saja, saat ini, pemerintah memang belum memberlakukan kebijakan penjaminan penuh.

Karena itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana upaya untuk menyegmentasi PUAB. Segmentasi itu terjadi, misalnya karena bank tertentu hanya mau memberikan pinjaman kepada bank tertentu. Kenapa bank tersebut tidak mau memberikan pinjaman kepada bank lain? Tentunya, karena ada risikonya.

"Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu lebih dipikirkan ke depan. Tapi, memang, hal tersebut tidak masuk dalam cakupan Undang-Undang (UU) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Artinya, tidak hanya cukup dengan peraturan pemerintah, di mana kita bisa mudah meningkatkan penjaminan dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar. Untuk yang

ini, harus ada aturan-aturannya yang lebih konkret dan jelas," jelas Muliaman.

Saat ini, lanjutnya, BI sudah memberikan semacam jalan keluar sementara. Yakni, dengan menjamin akses kepada sumber-sumber likuiditas di industri perbankan, sehingga tidak mengganggu keuangan perbankan sendiri.

Bank A, misalnya, tidak bisa mendapatkan dana (pinjaman) dari bank tertentu, tapi bisa mendapatkan pinjaman itu (untuk menolong likuiditasnya) dari BI. Dengan jalan seperti itu, persoalan likuiditas yang mungkin menimpa bank yang bersangkutan bisa teratasi.

Lantas, apa yang membuat pemerintah belum memberlakukan kebijakan penjaminan penuh? Muliaman mengaku tak tahu persis. Hanya, dalam situasi seperti sekarang ini, BI dan pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, tentu akan terus memonitor

kondisinya. Belakangan, Muliaman melihat, likuiditas perbankan sepertinya sudah kian longgar.

Pandangan berbeda diungkapkan Sigit Pramono, Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Menurutnya, *blanket guarantee* justru dibutuhkan untuk menjaga agar fundamental ekonomi yang kuat ini tidak terganggu akibat pelemahan kurs rupiah.

Ke depan, Sigit berharap, untuk melengkapi semua kebijakan antikrisis saat ini, BI harus mampu meyakinkan keharusan dikeluarkannya kebijakan *blanket guarantee*, baik untuk simpanan di bank maupun pinjaman antarbank.

"Kebijakan penjaminan penuh tersebut memiliki arti yang penting bagi bangsa kita, penting untuk sistem perbankan nasional, penting untuk sektor riil, dan untuk seluruh kepentingan nasional. Kita sepakat, dalam tubuh perekonomian suatu bangsa, bank boleh dibilang merupakan jantungnya. Karena itu, kita harus menyetatkan jantung tersebut. Tapi, jangan lupa juga, selain jantungnya sehat, anggota tubuh yang lain juga harus disehatkan kondisinya," ujarnya.

Menurut Sigit, kalau fokus di jantung sudah selesai—jantungnya tidak berdebar-debar lagi dan tidak perlu dikhawatirkan—bangsa ini bisa melakukan penyehatan di bagian tubuh yang lain. Lalu, ke mana arahnya?

Praktiknya, pemerintah bisa lebih fokus pada sektor riil. Karena, analoginya, kaki dan tangan perekonomian bangsa ini adalah sektor riil. Maklum, selama ini, ekonomi kita masih waswas terhadap sektor perbankan.

Sekali lagi, kalau memang sudah ada kebijakan penjaminan penuh, nasabah akan merasa tenang dan pinjaman antarbank pun nantinya bakal lebih cair. Selain itu, mudah bagi bank yang satu untuk menempatkan dananya di bank lain. Sekarang, bank masih takut melakukannya.

Dengan kebijakan itu, sektor perbankan bakal lebih tenang. Sehingga, bangsa ini bisa lebih fokus pada sektor riil yang jelas-jelas sangat memerlukan perhatian. Perbankan tak akan ada gunanya kalau sektor riil tidak berkembang. Untuk apa perbankan banyak dana kalau tidak bisa disalurkan dan diserap sektor riil.

Karena itu, tegas Sigit, sayang sekali jika kebijakan penjaminan simpanan penuh tidak dilakukan. Karena, tanpa kebijakan itu, sejumlah langkah lain untuk mengantisipasi krisis tak akan ada gunanya. Pekerjaan rumah di sektor riil masih menumpuk. Jadi, kenapa kita tidak sekalian menyelesaikannya? ■

Penjaminan Simpanan Menyelamatkan Likuiditas dan Rupiah

Pemerintah belum mau memberlakukan *blanket guarantee*. Padahal, selain untuk menambah kepercayaan, kebijakan ini dapat memengaruhi suku bunga simpanan dan nilai tukar rupiah. FPD dinilai bisa menjadi penggantinya.

Nurika Hikmawati

►►MESKI menguat, hingga hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih di atas Rp11.000. Kondisi tersebut disebabkan oleh sentimen global yang negatif. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah diminta mencegah melemahnya rupiah, di antaranya dengan menerapkan penjaminan penuh atas semua simpanan masyarakat di bank (*blanket guarantee*). Tujuannya, menenangkan pemilik dana agar tidak terpengaruh dan ikut-ikutan memburu valuta asing (valas).

Cara ini dinilai sebagai solusi terakhir untuk meredam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sebab, intervensi bank sentral dan kebijakan pembatasan pembelian valas belum efektif menenangkan mata uang lokal. Langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih Bank Century menambah sentimen negatif. Masyarakat awam yang tidak paham maksud kebijakan tersebut akan berpikir situasi finansial domestik sudah makin gawat.

Akhirnya, masyarakat makin tak percaya pada rupiah. "Kalau soal itu (sentimen negatif), kita tidak bisa melawan arus. Tapi, masih ada cara untuk mencegah pelemahan rupiah, yakni dengan menaikkan penjaminan simpanan secara menyeluruh, baik rupiah maupun dolar AS," begitu ungkap Djoko



Djoko Retnadi; mengerem laju suku bunga

Retnadi, ekonom senior dari The Indonesia Economic Intelligence.

Penjaminan penuh atas simpanan tersebut, lanjut Djoko, tidak seperti kebijakan *blanket guarantee* pada krisis 1998. Sebab, saat ini, kondisi perbankan nasional bagus dan tidak memiliki *exposure* utang luar negeri yang besar, sehingga tidak terpengaruh depresiasi rupiah. Pada 1998, pembiayaan transaksi perdagangan ikut dijamin, sedangkan sekarang, hanya simpanan masyarakat.

Masih menurut Djoko, selain untuk penguatan rupiah, *blanket guarantee* akan membantu mengerem laju kenaikan suku bunga perbankan dan menggairahkan kembali pergerakan pasar uang antarbank. Kebijakan ini juga akan memancing rasa percaya diri masyarakat untuk tidak melarikan dananya dari bank kecil ke bank besar atau bahkan ke luar negeri. Dari komposisi dana pihak ketiga (DPK) dalam sistem perbankan nasional, terlihat jelas urgensi menyediakan *blanket guarantee*.

Total DPK perbankan hingga Oktober 2008 tercatat Rp1.605,3 triliun. Dari total

DPK itu, hampir Rp600 triliun (39%) yang tidak dijamin. Jumlah tersebut representasi 2% dari total nasabah bank. Artinya, sekitar Rp1.000 triliun DPK milik 98% nasabah. Dari jumlah Rp600 triliun itu, lebih dari 50%-nya atau di atas Rp300 triliun milik individu. Merekalah yang diduga mulai memindahkan uangnya ke luar negeri.

Djoko menambahkan, saat ini, DPK perbankan cenderung mengarah ke deposito. Alhasil, terjadi perang bunga deposito oleh perbankan untuk mengumpulkan DPK. Persaingan itu harus segera dihentikan karena akan membuat inefisiensi di tubuh perbankan meningkat. "Komposisi DPK perbankan yang cenderung mengarah ke deposito bakal mendorong industri tersebut menuju inefisiensi atau biaya operasional dibagi pendapatan operasional (BO/PO) tinggi," ujarnya.

Selain itu, risiko kredit akan meningkat, sehingga mendorong suku bunga kredit makin tinggi dan persaingan suku bunga simpanan makin tidak sehat (*cut throat competition*). Agar kondisi demikian tidak berlanjut, Djoko menyarankan, LPS perlu menjamin seluruh simpanan DPK.

"Bukan hanya untuk alasan *safety* (keamanan) karena takut DPK pindah ke Malaysia atau Singapura yang menerapkan penjaminan simpanan 100%. Melainkan, untuk membatasi suku bunga penjaminan yang akan mereduksi suku bunga simpanan perbankan. Saat ini, LPS hanya menjamin simpanan hingga Rp2 miliar dan bunga sampai dengan 10%," tutur Djoko.

Namun, kalau pemerintah kelak menerapkan penjaminan menyeluruh, disarankan hanya melakukan *full guarantee*, bukan *blanket guarantee*. Dengan kata lain, pemerintah tidak menjamin penempatan dana-dana bank di pasar modal. Yang menjadi persoalan, sejauh ini, memang ada perbedaan persepsi antara pihak perbankan dan otoritas moneter terkait dengan penjaminan itu. Perbankan menginginkan penjaminan dana menyeluruh (*blanket*

guarantee). Karena itu, yang dijamin bukan hanya DPK, melainkan termasuk dana bank yang ditempatkan di pasar modal.

Djoko menegaskan, tidak ada masalah kekurangan likuiditas di tubuh perbankan. Hanya, terjadi ketimpangan distribusi likuiditas antara bank besar dan bank kecil. Ketimpangan distribusi itu telah memakan korban, yaitu Bank Century yang mengalami gagal kliring karena terlambat menyetorkan *prefund* senilai Rp5 miliar.

Untuk itu, LPS juga perlu menjamin fasilitas pasar uang antarbank untuk menjamin mekanisme pasar uang antarbank bisa berjalan dengan baik. Tanpa penjaminan dari LPS, dikhawatirkan akan terjadi *insolvent* dari bank kecil yang bakal berdampak psikologis kepada bank yang lebih besar. "Sekarang, arah pengumpulan DPK lebih kepada sepuluh bank terbesar. Bank Century kalah kliring harusnya tidak terjadi, sebelum *drop* harusnya dapat dana antarbank di *market*," jelasnya.

Yang tergolong sebagai bank berdampak sistemik adalah sepuluh bank terbesar dari sisi aset. Meskipun kelompok bank tersebut tergolong sulit bangkrut atau istilahnya *too big to fail*, pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Pemerintah dan BI juga harus mewaspadaikan rumor yang berpotensi merusak stabilitas perbankan. "Ini seperti orang yang tengah menonton bioskop. Bila seseorang menyebut ada kebakaran meskipun baru melihat kumpulan asap kecil, penonton lainnya akan panik dan berlarian keluar," ujar Djoko.

Berdasarkan data BI, DPK di bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) bertambah Rp40 triliun selama September 2008. Deposito menjadi jenis simpanan yang jumlahnya naik paling tinggi. Selain tingginya suku bunga simpanan, migrasi dana nasabah di bank kecil memicu kenaikan DPK di bank-bank besar.

Beberapa waktu lalu, bank sentral telah menyempurnakan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/31/2008 untuk



Bank Indonesia; menyempurnakan fasilitas pembiayaan darurat (FPD)

Djoko menegaskan, tidak ada masalah kekurangan likuiditas di tubuh perbankan. Hanya, terjadi ketimpangan distribusi likuiditas antara bank besar dan bank kecil.

bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, tapi masih memenuhi tingkat solvabilitas yang sudah ditetapkan. Bank yang berdampak sistemik juga menjadi prioritas memperoleh fasilitas tersebut.

Djoko menilai, kebijakan tersebut dapat menggantikan *blanket guarantee* apabila bank bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas. "Saya menduga, BI masih menginginkan *blanket guarantee*, tapi pemerintah tetap menolak. Daripada menunggu yang tidak jelas, BI berinisiatif membuat jaring pengaman sendiri. Saya pikir, itu esensinya sama dengan *blanket guarantee*," ungkapnya.

Kondisi tanpa *blanket guarantee* akan menyulitkan bank-bank kecil. Karena, bank

kecil khawatir nasabahnya akan pindah ke bank besar. Kondisi ini yang tidak dicermati oleh pemerintah, sehingga tetap menolak mengeluarkan kebijakan *blanket guarantee*. Di sisi lain, BI sudah kewalahan menahan laju nilai tukar rupiah, termasuk telah melakukan langkah moral.

PBI Nomor 10/31/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi bank umum mulai berlaku pada 19 November 2008. Kebijakan ini merupakan pembaruan PBI Nomor 8/1/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat. Kebijakan baru itu menyebutkan bahwa bank penerima FPD akan langsung ditempatkan dalam status bank dalam pengawasan khusus.

Status bank dalam pengawasan khusus itu akan hilang kalau bank bersangkutan sudah melunasi FPD. BI selanjutnya mengambil alih hak dan wewenang rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mengganti sebagian atau seluruh manajemen. BI juga yang akan menempatkan perwakilannya, baik sebagai direksi maupun komisaris bank, hingga FPD dilunasi. FPD diberikan sebesar kebutuhan bank untuk memenuhi kebutuhan giro wajib minimum (GWM) yang berlaku.

Upaya pemerintah menaikkan jaminan simpanan dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar merupakan tindakan positif. Namun, Djoko mengungkapkan, jaminan simpanan nasabah 100% juga diperlukan. Jangan sampai perbankan kekeringan likuiditas dan nilai rupiah kian terseok. ■

Sentot A. Sentausa

Sertifikasi, License to Work

Sertifikasi manajemen risiko yang sudah berjalan saat ini belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan bankir. Padahal, sertifikasi merupakan *license to work* yang harus mampu memenuhi tiga aspek sertifikasi, yakni *knowledge, skill, dan attitude*.

►► Di tengah ancaman resesi dunia, industri perbankan nasional dihadapkan pada potensi risiko yang makin tinggi. Program sertifikasi manajemen risiko memang sudah berjalan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi kalangan bankir, program ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan industri. Menurut Sentot A. Sentausa, Ketua Banker Association for Risk Management (BARa), program sertifikasi manajemen risiko yang berjalan saat ini baru meng-cover satu dari tiga unsur sertifikasi profesi, atau baru pada tahap *proficiency*. Lantas, seperti apa sertifikasi manajemen risiko yang dibutuhkan bankir? Sentot A. Sentausa mengungkapkannya kepada *Media Bankir*. Petikannya:

Manajemen risiko sudah mulai tertata di industri perbankan nasional. Bagaimana kondisinya akhir-akhir ini, terutama di tengah ancaman resesi dunia?

Kita tahu bahwa perbankan (nasional) saat ini belum terlalu merasakan dampaknya. Kalau di perbankan luar negeri, mereka terkena karena memiliki produk derivatif yang sangat kompleks. Saat terjadi gun-



cangan pada produk tersebut, tak bisa dihindari, mereka kolaps. Di sinilah, menurut saya, kita membutuhkan kemampuan / kompetensi untuk menerapkan *risk management* yang kuat di masing-masing bank agar kita sadar untuk menerapkan *risk management* melalui langkah bisnis yang sangat hati-hati.

Bagaimana peran Basel dalam menghadapi krisis global saat ini dan konteks implementasinya di Indonesia?

Basel merupakan bentuk standardisasi secara internasional dalam penerapan *risk management* agar seluruh perbankan memiliki kesamaan pandang dalam menerapkan *risk management*.

Namun, kendalanya, Basel itu menurut saya sebagai suatu *blue print* dari kondisi yang ada di sana. Sangat mungkin kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia. Artinya, meski di sana bagus, dalam konteks perbankan Indonesia, konsep itu 'kan belum

tentu tepat jika diterapkan semuanya di sini. Karenanya, BARa bermaksud membuat standar yang sesuai dengan kondisi di sini.

Asumsinya begini, Basel itu hasil rumusan standardisasi tentang manajemen risiko dari pakar perbankan dan regulator negara-negara maju yang sudah menerapkan manajemen risiko yang mungkin kalau dilevelkan jauh di atas kita. Nah, standar yang mereka bikin itu 'kan mau dimasukkan ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai level seperti mereka untuk menerapkan apa yang mereka rumuskan?

Kemudian, apakah kolapsnya bank-bank di luar negeri karena mereka tidak disiplin dalam penerapan *risk management* sesuai Basel atau karena Basel yang tidak dapat mengantisipasi gejolak dunia. Ini belakangan yg perlu kita kaji lebih dalam.

Lantas, apa yang bisa menjadi rujukan penerapan manajemen risiko?

Kita yakin bahwa Basel itu bagus. Cuma, konteksnya di sini yang mesti kita kaji ulang. Nah, buat kita, Basel itu akan kita gunakan sebagai *best practise* kita untuk menerapkan manajemen risiko. Jadi, kita jangan melihat Basel ini sebagai *exercise compliance* atau jangan sampai Basel ini dijadikan target agar *comply*.

Tapi, kita juga harus melihat *best practice* yang ada dalam Basel itu karena bermanfaat sebagai *guidance* untuk menerapkan manajemen risiko yang kuat. Jujur, memang kita tidak punya acuan, sehingga Basel itulah yang bisa kita jadikan acuan. Kalau nanti ujungnya kita bisa *comply* dengan Basel, ya *Alhamdulillah*.

Jika demikian, apa yang harus dilakukan bankir atau industri perbankan?

Untuk memulai itu semua, kita sedang membangun *expertise*-nya lebih dulu. Kita bangun infrastruktur dan budaya serta berbagai hal tentang penerapan manajemen risiko. Jika nantinya kita bisa *comply* dengan Basel, ya itu sangat bagus. Itu yang selalu kita tekankan pada teman-teman perbankan bahwa jangan kita mengejar agar kita bisa *comply* dengan Basel, tapi

kita sendiri tidak tahu manfaat buat kita sendiri.

Untuk bisa *comply* sepenuhnya dengan Basel itu, investasinya 'kan sangat besar. Misalnya, ada IT (*information technology*), SDM (sumber daya manusia), kebijakan, dan berbagai hal lain yang harus dipenuhi. Begitu juga, meskipun kita dapat memenuhi infrastruktur yang dipersyaratkan, tidak berarti kita langsung *comply* dengan Basel, sementara kita sudah mengeluarkan investasi yang sangat besar.

Untuk mewujudkannya, langkah apa yang ditempuh BARa?

Kita mulai membuat *sharing* forum. Di sana kita sama-sama bisa bertukar pengalaman dan pikiran. Bagi bank yang sudah maju, mereka harus tularikan kemampuan mereka ke teman-teman yang lain. Secara rutin, kita adakan *sharing* forum dengan anggota dan kita dengarkan paparan BI (Bank Indonesia) dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Tidak formal-formal amatlah.

Saya pikir, inilah yang akan efektif menciptakan kultur manajemen risiko. Menurut saya, sebenarnya kultur inilah yang jauh lebih penting daripada memenuhi standar infrastruktur. Kita serap kultur dan kompetensi Basel sebagai *best practice* sebagai penciptaan kultur manajemen risiko di Indonesia.

Bagaimana perkembangan penerapan manajemen risiko selama ini mengingat ketentuan dan program sertifikasi sudah berjalan lama?

Saya mulai dari BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) dulu. Kita coba evaluasi mereka. Saya *appreciate* BI untuk inisiatif membangun sistem untuk sertifikasi seperti BSMR selama ini. *Effort*-nya luar biasa dan *resources*-nya juga besar. Jujur, semua itu ada manfaatnya. Misalnya, dalam konteks sosialisasi. Sekarang orang banyak yang paham apa itu manajemen risiko.

Tapi, kita harus mencari sesuatu yang lebih baik. Kita harus terus maju dan tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita capai. Waktu itu memang belum ada yang mengurus, sehingga BI berinisiatif untuk mengambilnya. Demikian juga dengan perbankan. Mereka ikut sertifikasi karena sesuai regulasinya.

Dalam perjalanannya, kita 'kan terus berpikir bahwa yang ada sekarang dirasakan sudah kurang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita perlu yang lebih dari sekadar tes.

Setelah kita paham bahwa manajemen risiko itu perlu SDM, infrastruktur, budaya, kesamaan persepsi, atau standardisasi, kita perlu regulator untuk mengatur ini. Setelah

semua kita evaluasi, ternyata masalah kompetensi yang menjadi isu utama akhir-akhir ini. Kompetensi ini akan terbangun kalau semua kalangan paham mengenai implementasi manajemen risiko. Bagaimana cara membangunnya? Salah satunya adalah kita memang perlu orang yang bersertifikat untuk implementasi ini.

Bila kita lihat lebih jauh, sebenarnya apa itu sertifikasi? Sertifikasi itu 'kan *license to work*. Dalam konteks sertifikasi itu ada tiga aspek. Pertama adalah *knowledge*-nya (*proficiency*). Kedua, *skill*. Ketiga, *attitude*-nya. Nah, inilah persyaratan bagi sebuah proses sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Itu yang harus kita patuhi. Saya nilai, kita menghargai (*appreciate*) BSMR. Tapi, ini sebatas level *knowledge*-nya atau kita sudah dianggap *knowledgeable* atau *proficient*. Orang belajar, menghafalkan, tes, dan lulus. *Just it*. Tapi, ketika dia kembali bekerja di unit manajemen risiko misalnya atau lainnya, belum tentu bisa *applicative*.

Jika boleh dilevelkan, seperti apa aplikasi sertifikasi manajemen risiko di industri perbankan?

Kalau kita sudah memasukkan level, saya takut kita terjebak pada suatu aturan yang itu menjadi suatu dogma yang tidak bisa diubah.

Misalnya, di sekolah 'kan ada kelas satu sampai kelas enam atau kelas satu sampai kelas tiga. Kelas itu tidak mutlak mencerminkan murid pintar atau bodoh atau nanti bisa jadi apa atau menduduki jabatan tertentu. Itu 'kan hanya mencerminkan proses belajar kita yang makin lama makin tinggi dari sisi keilmuan.

Sementara, kita berada di pekerjaan dan bukan di area *training*. Kedua area ini mesti dibedakan. Kalau di area *training*, kita boleh memakai level-level itu. Sementara, kalau di level pekerjaan 'kan ada level manajer, manajer senior, *vice president*, dan seterusnya yang masing-masing memiliki *job coverage*, kewenangan, dan tanggung jawab. Ada *leadership*-nya, ada *knowledge*-nya, ada *skill*-nya.

Itulah yang menjadi sesuatu yang mem-

buat kita tidak bisa, misalnya, kalau S1 (strata satu) itu bisa jadi manajer, S2 (strata dua) itu boleh jadi manajer senior, dan direktur harus S3 (strata tiga). Pastinya, belum tentu penyandang gelar atau ijazah S1, S2, S3 bisa menduduki posisi-posisi tersebut. Seperti inilah kenyataan sertifikasi yang terjadi saat ini.

Sementara, bagi kita, setiap sertifikasi itu memerlukan kedalaman materi, memerlukan kedalaman pemahaman, memerlukan penerapan di masing-masing *job coverage* yang berbeda.

Menurut Anda sebagai Ketua BARa, apa yang mesti dibenahi untuk sertifikasi manajemen risiko saat ini?

Yang menjadi agenda pembenahan dari sistem sertifikasi manajemen risiko yang pertama adalah *body of knowledge*-nya. Artinya, kebutuhan asosiasi profesi *risk manager* di profesi perbankan ini



Layanan ATM; itu pun perlu disertifikasi

membutuhkan pengetahuan tentang itu. Kita butuh sertifikasi untuk itu. Tapi, sertifikasinya kita arahkan ke sesuatu yang kita sebut *license to work*-nya.

Kalau kita sudah masuk ke perbankan, *license to work* ini tentu akan berbeda-beda sesuai *job area*-nya. Dengan demikian, kita tidak bisa menyamakan materi sertifikasi. Tentunya, masing-masing *job area* ini membutuhkan *risk management* semua. Nah, inilah yang kita jalankan. Kita ingin sertifikasi itu disesuaikan dengan kebutuhan bank. Misalnya, untuk bagian *treasury*, dia harus punya sertifikasi di bidang *treasury*. Di (bagian) *operation*, dia harus punya sertifikasi *operation* atau sertifikasi di bidang *general banking*. Tapi, di masing-masing sertifikasi itu sudah ada modul manajemen risiko di bidangnya masing-masing. ■



Parwati Surjaudaja Presiden Direktur Bank OCBC NISP

Menjadikan OCBC NISP sebagai Bank Terbesar Kelima

RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank OCBC NISP pada 16 Oktober 2008 menunjuk Parwati Surjaudaja sebagai presiden direktur, menggantikan presiden direktur lama, Pramukti Surjaudaja. Sebelumnya, Parwati menjabat Wakil Direktur Utama Bank NISP sejak Juni 1997.

Sejak kecil, Parwati, sapaan akrabnya, sebenarnya tidak bercita-cita menjadi bankir. Parwati kecil lebih memilih profesi dokter. Sayang, Parwati tidak jadi mengambil jurusan kedokteran karena permintaan sang ayah yang tidak menginginkan Parwati kuliah terlalu lama.

Akhirnya, anak keempat dari empat bersaudara ini mengambil jurusan akuntansi yang dinilainya merupakan inti dari satu bisnis. Setelah bekerja di korporasi besar, seperti SGV Utomo/ Andersen Consulting (1987-1990), Parwati diminta membantu Bank NISP. Sejak 1990, Parwati lantas menjabat sebagai salah satu direktur di bank yang berpusat di Bandung ini.

Pemenang "World Young Business Achiver Award 1996" ini mengaku, meski sudah berada di puncak karier, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya. Misalnya, menjadikan Bank OCBC NISP sebagai bank nasional terbesar kelima sebelum 2013.

"Saya yakin, Bank OCBC NISP akan berkembang di atas nilai-nilai yang dibangun, seperti mendahulukan kepentingan bank di atas kepentingan lain, integritas, ketulusan, dan profesionalisme," tutur peraih *cum laude* gelar *master of business administration (M.B.A.)* dan *bachelor of science (B.Sc.)* dari San Francisco State University, Amerika Serikat, ini.

Herwidayatmo Direktur Kepatuhan PermataBank

Agar PermataBank Menjadi Great Bank



HERWIDAYATMO terpilih menjadi Direktur Kepatuhan PermataBank pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PermataBank Agustus lalu. Sebelumnya, dia menjabat Komisaris PermataBank sejak 17 Agustus 2006.

Herwid, sapaan akrabnya, bukanlah orang asing bagi PermataBank. Kala masih di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dia ikut sibuk mengurus proses *go public* Bank Bali dan Bank Universal. Bahkan, sebelum pergi ke Amerika Serikat untuk menjalankan amanah sebagai Direktur Eksekutif World Bank untuk kawasan Asia Pasifik pada November 2004, dia duduk dalam komite yang mengurus pelepasan saham PermataBank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada konsorsium Standard Chartered dan Astra Internasional, Tbk.

Pria yang pembawaannya kalem dan bersahaja ini mengaku merasa terhormat ketika dipercaya untuk menjabat Direktur Kepatuhan PermataBank. Sebagai komisaris, Herwid bertekad untuk membawa PermataBank *survive* di tengah persaingan bisnis perbankan yang makin keras. Selain itu, mendukung pencapaian PermataBank dari *good bank* menjadi *great bank*.

"Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu dan akan menjalankan fungsi dan peran saya dengan baik demi kemajuan PermataBank," ujar pria kelahiran Yogyakarta, 18 Oktober 1956, ini. Pada 1990-1992, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1981 ini berkesempatan belajar di Universitas Saint Mary's di Kanada untuk meraih gelar *master of business administration (M.B.A.)*.

Herwid memulai karier di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 1982 dan menduduki posisi ketua pada 2000-2004. Dia juga pernah menjabat Deputy Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 1998 hingga 2000 dan *Executive Director* Bank Dunia untuk Asia Tenggara pada 2004 hingga 2006.

Supriyatno Direktur Utama BPD DIY

UMKM, Saka Guru Perekonomian DIY



PADA 21 Agustus 2008, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, melantik

Supriyatno sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. Dia menggantikan Harsoyo yang telah menjadi direktur utama selama dua periode. Sebagai direktur utama baru, Supriyatno berjanji akan mengimplementasikan visi BPD DIY sebagai bank daerah yang memberikan layanan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan mendorong pemberdayaan ekonomi daerah. Peralannya, UMKM adalah saka guru perekonomian DIY.

Langkah awal yang akan ditempuh Supriyatno adalah meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sambil melanjutkan rencana program ke depan. Di antaranya, perubahan badan hukum perseroan terbatas (PT) guna memenuhi prasyarat sebagai bank devisa dan implementasi data tersentral, disertai langkah-langkah berkelanjutan dengan melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) perbankan.

"Dengan predikat 'sangat bagus' yang diberikan Majalah *Infobank* selama 11 tahun berturut-turut sejak 1996, predikat itu akan saya pertahankan dan tingkatkan mutunya," janji Supriyatno.

Ahdi Jumhari Luddin Direktur Kepatuhan BNI

Banyak Menimba Pelajaran di BI

Ahdi Jumhari Luddin, Direktur Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (BNI), Tbk., menegaskan pentingnya mekanisme regional yang berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk setiap kemungkinan krisis. Saat ini, Indonesia belum memiliki sistem ini. Yang juga penting adalah menyiapkan bantuan finansial untuk negara yang dilanda krisis moneter.

Fasilitas semacam itu saat ini baru secara bilateral. Indonesia, misalnya, memiliki fasilitas bilateral *swap arrangements* dengan Singapura. "Di masa depan, sebagai antisipasi krisis, bantuan finansial seperti itu sebaiknya juga tersedia secara regional," ujarnya.

Sebelum menjabat Direktur Kepatuhan BNI, Ahdi banyak menimba pelajaran di Bank Indonesia (BI). Jabatan Ahdi di Menara Gading itu,

antara lain Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 BI (2006-2008), Direktur Direktorat Pengawasan Bank 2 BI (2004-2006), Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank 2 BI (2004), Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 BI (2003-2004), dan Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI (2002-2004).

Selain memperoleh gelar master *policy economic* dari University of Illinois, United States of America (USA), pada 1989 dan sarjana ekonomi akuntansi dari Universitas Indonesia (UI), Jakarta, pada 1982, Ahdi memiliki segudang ilmu lainnya. Di antaranya, *executive risk management certification program*,



Belanda; *fundamental of interest rate risk management*, Kuala Lumpur; dan *highlevel meeting on regulatory capital & issue in financial stability*, Sidney.

Lisawati Wakil Direktur Bank Jasa Jakarta

Siap Menghadapi Tantangan Baru

TAK banyak wanita eksekutif yang mampu menduduki pucuk pimpinan. Apalagi di sektor perbankan yang terkenal dengan dominasi kaum adamnya. Lisawati adalah salah satu dari yang langka itu. Beberapa waktu lalu, perempuan asal Tulungagung, Jawa Timur, ini terpilih menjadi Wakil Direktur Bank Jasa Jakarta,

setelah sebelumnya menjadi nakhoda Bank Swadesi sejak 1994. Lisa, begitu dia biasa disapa, sangat mencintai pekerjaannya di bidang perbankan. "Saya akan terus meniti karier di jalur ini. Mungkin sampai usia pensiun saya," ujarnya.

Setelah memperoleh gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen bidang keuangan dari salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Lisa mengawali karier perbankannya pada 1973 sebagai staf bagian kredit di Bank Sumber Ekonomi Asia. Dia bergabung dengan Bank Swadesi sejak 1983 dengan jabatan direktur II dan kemudian menjadi direktur I pada 1988.

Pada 1989 hingga 1994, dia menjabat direktur operasional. Dalam kegiatan organisasi, Lisawati aktif di Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Kini, dia menjabat Bendahara Umum Perbanas Pusat.

Menilik perjalanan kariernya, Lisa sudah menggeluti dunia perbankan sejak seperempat abad lalu. Tak ayal, sosok wanita yang gemar berkebutan ini layak menjadi pemimpin Bank Jasa Jakarta. Lisa menilai, tantangan jabatannya sebagai Wakil Direktur Bank Jasa Jakarta tidaklah mudah. Namun, dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, Lisa akan memberikan yang terbaik untuk bank yang didirikan pada 1984 ini. □





Masa Depan Mereka Anda Tentukan Hari Ini



PT. Asuransi Jiwa Mega Life
Menara Bank Mega Lt.22
JL. Kapt. P.Tendean Kav. 12 -14A
Jakarta Selatan 12790
www.megalife.co.id

Kembangkan Profesionalisme Bankir Surabaya dan Jawa Timur

Setelah Yogyakarta dan Medan, IBI kembali mendirikan kantor komisariatnya di Surabaya, Desember lalu. Seperti dua kota sebelumnya, tujuan pendirian IBI Komisariat Surabaya adalah membangun kompetensi dan integritas bankir daerah.

▶▶ IKATAN Bankir Indonesia (IBI) seolah tak ingin berhenti membangun kompetensi dan integritas bankir daerah. Setelah pada Oktober 2008 mendirikan kantor komisariat di Yogyakarta dan Medan, 16 Desember 2008, IBI kembali membuka kantor komisariatnya di Surabaya, Jawa Timur.

Apa yang dilakukan IBI ini bukan semata-mata untuk menjaring keanggotaan di daerah, melainkan lebih dari itu. Keinginan IBI meningkatkan kompetensi dan integritas bankir daerahlah yang mendorong IBI segera membuka kantor-kantor komisariat itu.

Kepedulian IBI untuk meningkatkan kualitas bankir di Indonesia bukan pula disebabkan krisis keuangan global yang saat ini dihadapi hampir seluruh bangsa di dunia. Sejak berdiri pada 12 Desember 2005, IBI memang memiliki visi menjadi lembaga profesi para bankir yang memberikan manfaat bagi anggotanya dalam mengembangkan profesionalisme, mendorong kegiatan perbankan yang sehat,



dan melaksanakan tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance* atau *GCG*) dalam rangka membangun perekonomian nasional yang kuat.

Visi IBI ini sangat relevan dalam kondisi apa pun. Apalagi, di tengah krisis ekonomi seperti saat ini, peran IBI sangat dibutuhkan. Mencetak bankir yang memiliki kompetensi dan integritas baik adalah kewajiban IBI. Bagi industri perbankan sendiri, memiliki bankir yang kompeten dan bereputasi baik adalah suatu keharusan.

Kebutuhan ini bukan hanya untuk memenuhi persyaratan yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/25/PBI/2003 Tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian dan Kepatuhan bagi Calon Pengurus Bank. Peraturan itu mensyaratkan direksi dan komisaris bank harus memiliki

integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik.

Keinginan mendorong industri perbankan yang sehat memang sudah menjadi pilar IBI. Untuk menciptakan kondisi seperti itu, perbankan Indonesia tentu harus digawangi bankir yang memiliki kualifikasi mumpuni. Selain mendorong industri perbankan yang sehat, IBI masih memiliki dua pilar untuk mendukung ekonomi bangsa ini, yakni mengembangkan profesionalisme bankir dan melaksanakan *GCG*.

Acara peresmian IBI Komisariat Surabaya diisi presentasi Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam presentasinya, Firdaus memaparkan peran LPS dalam menjaga stabilitas perbankan nasional di tengah krisis keuangan global. ▣

Perlu Sinergi di Tengah Resesi

Ketika krisis global mulai menjalar, sektor ekspor dan impor menurun. Pendapatan devisa pun berkurang. Pemerintah berusaha menjaga *market* yang ada dan membuka akses pasar baru.

Mari Elka Pangestu

►► DUNIA dilanda resesi ekonomi. Harga komoditas pun menurun. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2008 masih aman dan cukup tinggi. Nilai ekspor dan investasi pun masih dalam batas aman. Bahkan, Indonesia relatif lebih beruntung dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Namun, efek yang lebih dahsyat akan segera dirasakan di tahun ini. Karena itu, pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan (Depdag), berusaha membuat proyeksi untuk 2009.

Tapi, hal itu sulit dilakukan saat ini. Karena, semua negara melakukan revisi secara terus-menerus. Kita belum tahu di mana *bottom line*-nya, keadaan di eksternal seperti apa, dan dampaknya seperti apa terhadap perekonomian kita. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagai *policy maker*, yakni bagaimana *me-manage* masalah-masalah yang ada.

Ketika menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), kita membuat proyeksi pertumbuhan 5,5%. Secara gampang saja, kalau kita tidak berbuat apa-apa, sangat disayangkan karena kita memiliki *market* dalam negeri yang besar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia *natural growth*-nya minimal 3%. Tapi, jika masih ada stimulus, yakni investasi yang masuk dan masih ada ekspor, kita mungkin bisa tumbuh 4% hingga 5%. Ini hanya angka kasar.

Namun, yang pasti, pertumbuhan



Biasanya, perdagangan tumbuh hampir sama dengan *economic growth*. Bila pertumbuhan ekonomi 4%, perdagangan mungkin tumbuh sekitar 5%. Tapi, yang memang akan anjlok di masa resesi ini adalah ekspor.

ekspor akan turun. Seberapa besar penurunannya, pemerintah belum dapat memberikan nilai pastinya hingga sekarang. Sama halnya dengan investasi, yang juga ikut mengalami penurunan. Dalam hal ini, yang penting adalah mempertahankan pertumbuhan yang ada karena 65% pertumbuhan datang dari pasar dalam negeri. Saat ini, pemerintah tengah

mempertahankan *domestic consumption growth* agar berada di posisi 5%.

Dengan kondisi seperti itu, ke depan, produksi pertanian sebagai *basic* yang termasuk dalam *production five* akan terus digalakkan. Beras akan tetap ditanam. Jadi, basisnya *agriculture product*. Begitu pula dengan perdagangan secara sektor yang akan tetap tumbuh.

Biasanya, perdagangan tumbuh hampir sama dengan *economic growth*. Bila pertumbuhan ekonomi 4%, perdagangan mungkin tumbuh sekitar 5%. Tapi, yang memang akan anjlok di masa resesi ini adalah ekspor.

Dari segi *exchange rate*, Indonesia sebenarnya telah melakukan koreksi pada November 2008. Karena, keadaan yang dianggap sudah lebih stabil terjadi pada November. Padahal, di negara lain, koreksi *exchange rate* telah terjadi jauh lebih awal. Untuk *stock market*, hampir sama, yakni terjadi *correction market*. Cadangan devisa kita memang mengalami penurunan, tapi masih relatif aman karena masih ada selisih impor.

Ekspor juga sudah mulai turun. Pada Oktober, ekspor turun 11%. Kalau melihat tren, ini baru permulaan. Masalah utamanya adalah pertumbuhan ekspor akan turun lebih cepat dan lebih tajam daripada pertumbuhan impor.

Meski pertumbuhan ekspor dan impor bakal turun, berdasarkan pengalaman, waktunya sekitar tiga hingga enam bulan. Jadi, investasi akan *slow down*. Ekspor juga demikian, sehingga berdampak pada inflasi. Ke depan, kita harus benar-benar menjaga eksekusi dari penurunan ekspor yang lebih tajam dibandingkan dengan impor.

Menurut data yang ada, ekspor Indonesia sampai dengan Oktober 2008 masih tumbuh 26,9%. Diperkirakan, hingga

Desember, ekspor masih berkontraksi. Pertumbuhan ekspor saya perkirakan mencapai 16%. Hal itu terjadi karena adanya lonjakan pada awal semester akibat kenaikan harga komoditas. Jadi, ketika komoditas anjlok, ekspor pun menurun.

Yang juga menyelamatkan kita adalah *direction of export*. Negara-negara yang langsung jatuh saat terjadi krisis adalah Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang. Dalam lima tahun terakhir, *share* kita dengan negara-negara itu berkurang. Sedangkan, negara seperti Malaysia dan Singapura eksposurnya jauh lebih besar ke AS, sehingga keduanya lebih awal terkena imbas krisis.

Malaysia, misalnya. Ekspor produk elektronik negara ini ke AS mencapai 40%. Ini membuat pertumbuhan mereka langsung negatif. Bagaimana dengan Indonesia? Karena eksportnya berbasis *agriculture product*, kita juga akan terkena krisis, meski sekarang belum terlalu kelihatan dampaknya.

Bagaimana prospek perdagangan Indonesia? Melakukan proyeksi memang gampang-gampang susah. Untuk harga komoditas internasional, sekarang ini tak ada yang bisa memprediksi apakah akan turun lebih banyak atau tidak. Pada 2008, harga komoditas memang *over heating*. Kita berusaha mengambil *save-nya* saja, sehingga harga akan dikembalikan pada posisi 2006.

Volume komoditas akan turun. Tapi, penurunannya tidak akan mencapai 50% karena orang masih memerlukan minyak goreng. Beberapa jenis komoditas dasar pun akan turun karena permintaannya turun. Tapi, komoditas seperti timah, nikel, dan tembaga pasti akan turun karena berkaitan dengan kontraksi pada sektor industri transportasi.

Kita masih ada pertimbangan. Tapi, yang sudah seperti mengalami penurunan adalah industri ekspor manufaktur yang mengalami dampak paling hebat akibat resesi sekarang ini.

Perkembangan nilai tukar juga tentu memengaruhi ekspor dan impor. Sebetulnya, eksportir cukup *happy* dengan adanya koreksi *exchange rate* seperti ini. Kebijakan kita adalah berusaha mempertahankan sektor riil dan mengamankan pasar dalam negeri, melakukan penetrasi ke pasar luar negeri, dan menjaga agar kita tidak terkena restrukturisasi pasar di luar negeri.

Untuk sisi ekonomi secara luas, pertumbuhannya diperkirakan masih positif. Dua bulan lalu, semua orang berharap

Republik Rakyat Cina (RRC) *is going to be the heavier for the world*. Karena, ekonomi RRC masih tumbuh 8%-9%, walaupun sudah direvisi dari 11%. Sekarang, RRC kembali merevisi pertumbuhannya menjadi 6%-7%.

Ternyata, langkah itu juga diikuti negara tetangga lainnya, India. Sebelumnya, pertumbuhan negara itu ada di level 6%-7%. Sekarang, turun menjadi 5%-6%. Bagaimana dengan Indonesia? Paling tidak,



berdasarkan pertumbuhan perdagangan dunia, perkembangan ekonomi Indonesia akan tumbuh kira-kira 3% hingga 6%. Hal ini tentunya akan berjalan jika sistem-sistem yang terkait di dalamnya melakukan perannya secara maksimal, seperti investasi, *policy maker*, dan stimulus.

Untuk menanggulangi dampak resesi yang lebih dahsyat pada 2009, pemerintah melakukan *reducing high cost economic* di sektor riil, yakni pengurangan biaya-biaya ekonomi. Untuk merealisasikannya, sistem-sistem yang terkait dengan hal itu harus berjalan dengan baik. Mulai dari kontainer yang ada—agar tidak terkena macet di jalan—logistik jalan, bea cukai, hingga pelabuhan.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan Rp12,5 triliun untuk insentif pajak. Ini akan ditujukan pada sektor manufaktur yang paling besar terkena dampak krisis, seperti tekstil, otomotif, elektronik, dan besi baja yang sekarang ini sudah berteriak-teriak dan sudah mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kami juga berusaha menjaga akses pasar. Karena, begitu krisis muncul, semua negara memroteksi pasarnya. Upaya untuk

mendongkrak perdagangan memang telah dilakukan, antara lain melalui pertemuan kepala-kepala negara yang tergabung dalam G-20.

Saat itu, semua kepala negara mengatakan bahwa dalam kondisi krisis seperti saat ini, semua negara tidak boleh menutup diri, *keep market open*. Namun, praktiknya, ada tendensi masing-masing berusaha memroteksi diri, kendati belum seperti depresi 1930-an.

Beberapa eksportir memang sudah terkena praktik *dumping* di beberapa negara. Ini merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk mengamankan agar eksportir kita terhindar dari tuduhan *dumping* akibat restrukturisasi yang timbul. Praktik *dumping* ini sangat dirasakan pada beberapa sektor, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) dan besi, baja. Karena itu, kita harus tetap menjaga lobi dan mengadakan promosi yang lebih terarah ke pasar baru, pasar yang lebih prospektif.

Di sini, kita perlu berkoordinasi dengan perbankan. Karena, di pasar baru ini, *risk-nya* justru lebih tinggi dan mungkin dalam hal *trade financing* memerlukan koordinasi yang lebih antara bankir, eksportir, dan Depdag. Ini perlu dilakukan secara bersama-sama agar sektor *financing* juga bisa berjalan. ■

Penulis adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI). Tulisan ini disarikan dari presentasinya pada acara "Member Gathering Ikatan Bankir Indonesia (IBI)" sekaligus ulang tahun IBI ketiga di Jakarta, pada 12 Desember 2008.

KPR Griya Monas

Miliki Hunian Idaman

Fasilitas Kredit Untuk *) :

- Kepemilikan Rumah, Ruko, Rukan
- Rusunami / Apartemen
- Take Over / Refinancing

*) Kondisi baru maupun bekas
dapat pula untuk pemilikan toko/kios
ketentuan berlaku

- Syarat Mudah
- Proses Cepat

**Bunga
Menarik !!!**

Segera hubungi Bank DKI Terdekat
atau call centre, Telp. 021-2354 5555, atau
Grup Mortgage & Housing, Telp. 021-3855313
ext. 128, 130, 133

Tiga Tahun IBI, Membangun Kompetensi Sejak Dini

Meski baru berumur tiga tahun, kiprah IBI tak diragukan lagi. Di usianya yang masih tergolong dini, IBI telah memayungi empat organisasi yang berperan penting dalam pembangunan kompetensi bankir Indonesia.

►►BARU seumur jagung. Istilah itu kerap digunakan untuk mengomentari masa tempuh yang belum terlalu lama. Istilah itu juga tepat disematkan kepada Ikatan Bankir Indonesia (IBI) yang baru saja genap berusia tiga tahun.

Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga, pada 12 Desember 2008, IBI menggelar *member gathering* di Gedung PermataBank. Selain dihadiri anggota, acara tersebut dihadiri Menteri Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Firdaus Djaelani.

Dalam paparannya, Mari Elka Pangestu menjelaskan tentang perkembangan perdagangan internasional Indonesia dan prospeknya. Dalam kurun waktu Januari-Oktober 2008, nilai ekspor Indonesia secara kumulatif tumbuh 26,9% ketimbang periode yang sama 2007. Dari angka tersebut, ekspor nonmigas mengalami pertumbuhan 21,6%.

Mari Elka menegaskan bahwa tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perdagangan internasional Indonesia. Pasalnya, krisis ekonomi global telah menyusutkan daya serap pasar dunia terhadap semua produk, termasuk produk-produk Indonesia.

Di sisi lain, masih tingginya bunga bank menjadi kendala bagi pengusaha untuk melangsungkan produksinya. Hal ini juga



menjadi salah satu penghambat upaya peningkatan ekspor. Karena itu, melalui pelbagai upaya komprehensif, pemerintah terus mendorong produk-produk dalam negeri agar mampu menembus pasar internasional.

Menyikapi hal tersebut, Agus Martowardojo, Ketua IBI, mengajak seluruh bankir anggota IBI untuk ikut mendorong pertumbuhan sektor riil. Caranya dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk memperoleh kredit dari bank.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani, memaparkan tentang keberadaan LPS di tengah kondisi ekonomi global yang saat ini mengalami guncangan. Saat memaparkan beberapa contoh kasus bank yang kini sedang ditangani, Firdaus menegaskan fungsi-fungsi dan *progress report* LPS sejak pertama dibentuk.

Tak diragukan lagi, meski tergolong masih sangat muda, bahkan boleh dibilang masih

dalam tahap merintis, IBI telah mampu menunjukkan eksistensinya di kancah organisasi profesi. Usia yang masih muda ternyata tak membuat organisasi ini enggan bergerak. Sebaliknya, IBI mampu menjadi wadah yang eksis bagi kalangan bankir di Indonesia.

Buktinya, IBI telah menjadi payung beberapa organisasi yang memiliki peran penting dalam pembangunan kompetensi bankir Indonesia. Saat ini, IBI telah memayungi empat asosiasi profesi bankir spesialis. Keempat asosiasi itu adalah Association Cambiste Internationale (ACI) Indonesia Forexindo, Certified Wealth Managers Association (CWMA), Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI), dan Banker Association for Risk Management (BARA).

Basis organisasi yang cukup membumi membuat IBI cepat berkembang. Di usianya yang ketiga, IBI telah memiliki tiga kantor cabang, yakni di Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Hingga saat ini, jumlah anggota IBI sekitar 400 orang. ■

Menciptakan Harmonisasi di Perbankan Lokal



Salah satu sisi Yogyakarta; *market potensial*

Uniknya *market* perbankan Yogyakarta menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan di daerah ini. Kualitas SDM pun perlu ditingkatkan. Ini tantangan bagi IBI Komisariat Yogyakarta.

Ninuk Saskiawardani

►► KETIKA Anda diminta menyebutkan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, bisa jadi Yogyakarta yang muncul dalam benak Anda. Yogyakarta memang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Pulau Jawa. Dilihat dari sisi potensi ekonomi, menurut Supriyatno, Ketua Komisariat Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Yogyakarta merupakan *market* yang unik. Keragaman objek wisata yang ada di daerah ini telah mendudukkan Provinsi DIY sebagai pilihan. Selain Bali, tentunya.

Apa yang dimiliki Yogyakarta merupakan daya tarik tersendiri yang membedakannya dengan tempat wisata lain. Iklim yang baik, pemandangan dan budaya yang beragam, sejarah yang menarik, serta masyarakatnya

yang ramah dan bersahabat merupakan nilai lebih kota gudeg ini.

Idealnya, sektor-sektor unggulan ini dapat dideteksi industri perbankan. IBI sebagai organisasi profesi bankir tampaknya mencium potensi-potensi yang dimiliki daerah ini.

Buktinya, pada 17 Oktober 2008, IBI mendirikan kantor komisariatnya di daerah ini.

IBI Komisariat Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme bankir Yogyakarta, yang pada akhirnya diharapkan mampu menghidupkan denyut perekonomian daerah ini. Semua itu akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang konkret.

Selain sektor pariwisata, industri kreatif menjadi ujung tombak perekonomian Yogyakarta. Sektor perbankan di daerah ini pun menjadikan industri kreatif sebagai industri yang memiliki potensi pembiayaan cukup bagus. Selain menjadi peluang, nilai lebih ini menjadi tantangan bagi pelaku industri perbankan.

Praktisi perbankan di Yogyakarta harus benar-benar mengenal karakter industri di wilayah ini sekaligus risikonya. Keluhan-keluhan pelaku bisnis pun harus dikenali pelaku perbankan di Yogyakarta.

Sektor industri kreatif, misalnya. Sebagian besar pelaku sektor ini adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Kendala yang sering dihadapi sektor UKM untuk memperoleh pendanaan perbankan adalah agunan. Mereka menganggap, aturan perbankan mengenai agunan ini terlalu kaku. Menurut Supriyatno, yang juga Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, ke depan, harus ada program-program konkret untuk menyelesaikan masalah ini.

"Bila IBI Komisariat Yogyakarta ingin

kehadirannya bisa memberikan manfaat, seharusnya bisa memberikan solusi terhadap perkembangan sektor-sektor khusus ini," ujarnya.

Satu hal yang tak bisa dikesampingkan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Agar lebih berperan dalam pengembangan ekonomi daerah, kualitas SDM perbankan pun harus mumpuni. Berkaitan dengan pengembangan SDM, IBI Komisariat Yogyakarta dapat membantu pengembangan transformasi teknologi dan pengetahuan SDM. Dua hal ini sangat dibutuhkan bankir-bankir di daerah, terutama SDM bank-bank lokal seperti BPD.

Kesetaraan kemampuan ini akan menghasilkan persaingan yang sehat di antara pelaku industri perbankan. Bila hal ini terwujud, berarti, IBI berhasil membangun harmonisasi industri perbankan di daerah. Sudah seharusnya industri perbankan saling menghidupi. "Jadi, antarbank bisa saling menjaga harmoni di perbankan lokal," ungkap Supriyatno.

Menurutnya, kinerja perbankan di Provinsi DIY hingga November 2008 memang tidak mengecewakan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), dana yang berhasil dihimpun sektor perbankan mencapai Rp16,92 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2007, angka tersebut tumbuh 13%. Potensi penghimpunan dana masyarakat ini masih dapat ditingkatkan.

Dengan 150 kantor bank umum yang beroperasi dan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta, kemampuan setiap kantor bank dalam memberikan pelayanan dapat lebih dioptimalkan. Bila semua penduduk Yogyakarta diasumsikan berinteraksi dengan sektor perbankan, setiap kantor bank diperkirakan melayani sekitar 20.000 penduduk. Bila hitungan ini bukan angka yang tepat, paling tidak, ini menjadi patokan bahwa setiap kantor bank di Yogyakarta berpotensi meng-*handle* 20.000 penduduk.

Selain pertumbuhan penghimpunan dana, prestasi lain yang dicetak industri perbankan Provinsi DIY adalah pertumbuhan kreditnya. BI mencatat, kredit perbankan pada November 2008 tumbuh 29,94% ketimbang periode yang sama pada 2007. Hingga November 2008, portofolio kredit yang

berhasil dikucurkan perbankan Yogyakarta Rp9,88 triliun. Padahal, November 2007, angka kucuran kredit perbankan daerah ini Rp7,58 triliun.

Angka pertumbuhan kredit perbankan Yogyakarta memang masih di bawah pertumbuhan perbankan nasional. BI mencatat, pertumbuhan kredit perbankan nasional pada November 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 38,02%. Masih ada jalan bagi industri perbankan untuk mendorong kucuran kredatnya.

Demikian pula perbankan di Yogyakarta. Peluang perbankan Yogyakarta untuk meningkatkan kucuran kredit masih cukup tinggi. Selain sektor pariwisata dan industri kreatif, masih ada sektor-sektor yang layak dilirik.

Menurut Supriyatno, sektor pertanian adalah potensi lain provinsi ini. Sektor jasa, hotel, dan restoran memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY. Apalagi, sebagai kota pelajar, kinerja sektor-sektor ini akan meningkat saat tahun ajaran baru. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang sering dilakukan di Yogyakarta juga memberikan sumbangan bagi pergerakan ekonomi provinsi ini.

Susunan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Bankir Indonesia Komisariat Yogyakarta

Ketua	: Supriyatno
Wakil Ketua	: Teddy Rustandi A.R.
Sekretaris	: Teddy Alamsyah
Bendahara	: Arnold Maukar
Bidang Organisasi, Keanggotaan & Advokasi Anggota	: 1. Hermin Kristina 2. Agung Witjaksono
Bidang Komunikasi Anggota	: 1. Andreas Haryanto 2. Agus Susanto 3. Ririn Ismarindayani
Bidang Sosial & Olahraga Anggota	: 1. Ismet Ali Gani 2. R. Hendriono K.

Melihat potensi ini, Tjahjo Oetomo, Pemimpin BI Yogyakarta, menyampaikan imbauan supaya perbankan menyalurkan kredit kepada sektor produksi. "Hal ini akan mendukung pertumbuhan sektor riil dan penyerapan tenaga kerja," jelasnya kepada *Kedaulatan Rakyat*.

Di tengah kondisi ekonomi yang kurang

konduktif seperti saat ini, Yogyakarta optimistis memroyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4%-4,5% pada 2009. Perekonomian yang sudah kondusif ini harus dipertahankan. Perbankan harus mempertahankan harmoni perekonomian yang sudah ada. Konsekuensinya, SDM perbankan harus berkualitas agar harmoni itu tidak rusak. ■



DEPOSITO SUKA SUKA

"Kinilah Saatnya Anda Bebas Menentukan Apa Yang Anda Suka...."



Keleluasaan dan Keuntungan dari Deposito Suka Suka :

Keleluasaan

- Tentukan pilihan perlakuan bunga sesuai yang diinginkan, baik untuk dikapitalisasi kedalam pokok atau dipindahbukukan ke rekening afiliasi.
- Tentukan pilihan anda sesuai yang diinginkan melalui jangka waktu yang kami tawarkan, yaitu 1,3,6 dan 12 bulan.
- Keleluasaan pencairan karena bisa dilakukan kapan saja sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan.*
- Kemudahan dengan fasilitas perpanjangan secara otomatis (ARO=Automatic Roll Over).

Investasi Menguntungkan

- Tingkat suku bunga yang menarik dan menguntungkan.
- Fasilitas bunga berbunga setiap tanggal jatuh tempo bunga (capitalized interest).
- Bebas biaya penalty dalam hal pencairan sebelum jatuh tempo dan bunga berjalan diberikan secara proporsional.

* Untuk pencairan dibawah 1 (satu) bulan akan dilakukan rekalifikasi tingkat suku bunga yang diberikan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Customer Service kami di seluruh cabang Bank Jabar Banten terdekat.



BANK JABAR BANTEN
Mitra Usaha Menuju Sejahtera



Member Gathering dan Ulang Tahun IBI Ketiga

IKATAN Bankir Indonesia (IBI) menggelar *member gathering* di Gedung PermataBank, 12 Desember 2008. Selain dihadiri pengurus dan anggota IBI, acara ini dihadiri Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan dan Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mari Elka Pangestu memrepresentasikan hal-hal berkaitan dengan ekspor nasional, sementara Firdaus Djaelani memaparkan tentang penjaminan simpanan nasabah. *Member gathering* kali ini juga diisi pemotongan tumpeng untuk merayakan ulang tahun IBI ketiga.





Pembukaan IBI Komisariat Surabaya

PADA 16 Desember 2008, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) membuka kantor komisariatnya di Surabaya, Jawa Timur. Ini merupakan kantor komisariat IBI ketiga setelah sebelumnya, Oktober 2008, IBI membuka kantor komisariatnya di Yogyakarta dan Medan. Peresmian kantor komisariat itu diisi *talk show* dengan pembicara Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam presentasinya, Firdaus memaparkan peran LPS dalam menjaga stabilitas perbankan nasional di tengah krisis keuangan global saat ini.



Pesona Rumah Alam Sang Maestro Keramik

Ke mana Anda akan pergi akhir pekan ini? Daripada jalan-jalan ke mal atau ke bioskop, lebih baik pergi ke Rumah Keramik F. Widayanto. Selain dapat belajar membuat keramik, di tempat ini, Anda akan dibuai keindahan alam.

Nurika Hikmawati

►► BAYANGKAN sebuah rumah konsep yang ditata sedemikian detail dengan pernik benda-benda seni terserak di sana sini, mulai dari ruang tamu utama hingga sudut kamar mandi dan taman. Apa yang akan Anda rasakan? Dibalut atmosfer tema tradisional yang sarat nilai budaya Jawa, pastinya, Anda tak akan berhenti berdecak kagum. Tempat itu memang mengagumkan.

Itulah gambaran Rumah Keramik Tanah Baru F. Widayanto. Rumah yang terletak di Tanah Baru, Beji, Depok, ini dibangun sang maestro keramik Indonesia, F. Widayanto. Sang perupa mencurahkan seluruh daya cipta dan misinya di atas tanah berpohon rimbun seluas 1,4 hektare (ha). Rumah Keramik F. Widayanto merupakan rumah pribadi sang seniman. Namun, khusus Sabtu dan Minggu, tempat ini dibuka untuk umum. Di dua hari itu, sang pemilik memang menggelar *open house*. Dengan uang Rp10.000, pengunjung bisa menikmati keindahan seni keramik berbalut alam.

Sejauh mata memandang, tampak hamparan rumput hijau dan taman nan cantik. Dengan tatanan tanah berundak-undak, Rumah Keramik F. Widayanto dibagi menjadi tiga tingkat. Di tingkat pertama, ada pendopo, restoran, galeri produk massal, dan rumah panggung yang semuanya bergaya joglo. Pendopo dan rumah panggung biasanya disewakan kepada pengunjung yang ingin bersantai sejenak dan keluar dari rutinitas kehidupan



Rumah keramik; mengasah kreatifitas

perkotaan. Sementara, restorannya menyediakan berbagai menu tradisional, seperti sayur asem, sayur lodeh, tumis jantung pisang, plus sambal tomat hijau.

Di dalam galeri, terpajang semua karya F. Widayanto, seperti gelas, kalung, kap lampu, hiasan dinding, dan piring. Galeri itu memang tak selengkap galerinya yang lain yang tersebar di Jakarta, yakni di Setiabudi, Panglima Polim, dan Kelapa Gading. Tapi, bagi pengunjung yang sekadar ingin memiliki satu atau dua karya pria lulusan seni rupa Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, tempat ini bisa jadi pilihan.

Tingkat kedua Rumah Keramik F. Widayanto merupakan rumah utama sang pemilik, termasuk kamar pribadi F. Widayanto, dan taman. Menurut pemandu, rumah itu adalah rumah singgah F. Widayanto saat berkunjung ke Tanah Baru. Maklum, dia memang memiliki banyak rumah, seperti di Setiabudi dan Tapos.

Rumah itu kental dengan nuansa etnik Jawa. Mulai dari desainnya yang khas, langit-langit yang tinggi, furnitur yang serba-Jawa, hingga patung-patung keramik karya F. Widayanto yang bertema mitologi Jawa.

Lukisan-lukisan karya pria yang mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan keramik Indonesia ini juga turut menghiasi rumah itu. Tambahan detail dan ornamen di setiap sudut ruang membuat rumah utama terkesan sangat artistik. Jika pengunjung membutuhkan pelbagai informasi saat menjelajah rumah utama, beberapa pegawai siap membantu.

Studio atau kelas *workshop* keramik ada di tingkat tiga rumah itu. Di sana, pengunjung dapat belajar membuat keramik. Dengan biaya Rp60.000, pengunjung bisa mendapatkan segepok tanah liat untuk membuat keramik. Dalam pembuatan keramik, pengunjung diberi dua pilihan, yakni menggunakan cetakan atau membentuk sendiri. Membuat keramik dengan cetakan lebih mudah dan praktis. Sebab, tanah liat tak perlu dibentuk lagi. Sedangkan, membuat keramik secara manual memang lebih rumit. Kendati demikian, cara ini dapat mengasah kreativitas. Setelah melalui pewarnaan dan pembakaran yang dilakukan pegawai Rumah Keramik, hasil cetakan biasanya bisa diambil dalam dua minggu.



Jadi, selagi para orang tua berkeliling memuaskan mata menikmati setiap objek seni yang terselip di antara dedaunan, di lantai, di tiang-tiang, tergantung di atap, atau menempel di dinding, anak-anak bisa mengikuti program "Fun With Clay" di studio *workshop*. Program ini memang khusus dibuat untuk anak-anak. Konsepnya, mengenalkan tanah liat dan alam sejak dini kepada anak-anak. Melalui program ini, diharapkan, anak-anak dapat mencintai alam dan keramik.

Ide *open house* sendiri muncul karena F. Widayanto ingin memperkenalkan dirinya secara utuh di luar produk-produk keramik. Dia ingin orang melihat totalitas dirinya. Dengan begitu, orang bisa memahami karya-karyanya. "Saya bukan hanya menjual barang, tapi totalitas saya dengan memperlihatkan kepada publik semua yang saya sukai. Jadi, tidak ada orang bertanya, kenapa saya membuat patung dengan suatu bentuk tertentu. Saya ingin orang mengetahui bagaimana gaya hidup saya, apa yang saya makan, dan bagaimana saya berkreasikan," ujar Yanto, sapaan akrabnya, kepada *Media Bankir*, belum lama ini.

Yanto sendiri memang ingin mendekatkan diri pada alam. Menurutnya, alam tak pernah berbohong. Daripada membangun rumah putih gaya Spanyol dengan kolam renang atau lapangan golf mini, Yanto lebih memilih kembali ke karakter alam. Yanto memang tampak sangat serius dengan pendekatannya pada aspek alam. Dia tak sekadar menanam, tapi juga membangun sebuah harmoni dengan alam. Dia ingin, segala hal yang



berhubungan dengan alam tampak dramatis.

Lihat saja, lahan di pinggiran rumah dia tanami lebih dari 1.000 pohon pinus. Ada juga beberapa jenis "tanaman gunung", di antaranya rambutan, mangga, avokad, dan durian. Beberapa jenis pakis juga tumbuh hampir di seluruh wilayah rumah Yanto.

Yanto membeli lahan lebih kurang 1 ha. Dari luas areal itu, dia hanya mengambil 300 meter untuk membangun sebuah rumah elok, 600 meter untuk bengkel tempat pengunjung bermain tanah liat, dan sisanya dimanfaatkan untuk taman. "Saya senang



dengan udara terbuka. Saya suka tanaman. Sederhana karena saya suka udara bersih dan hijau. Saya senang karakter alam, seperti kayu, tanah, rumput. Saya tidak suka sesuatu yang keras. Apa yang dipunya alam saja yang saya keluarkan," tuturnya.

Yanto juga memasukkan karakter alam ke dalam rumahnya. Langit-langit sengaja dibuat tinggi untuk mengakomodasi udara tropis yang panas dan lembap. Pintu dan jendela dibuat berukuran besar, sehingga mata bisa leluasa memandang hijaunya rerumputan dan pepohonan. Atap kamar mandi dibiarkan terbuka supaya penggunaannya bisa menikmati kicauan burung, pucuk pohon, dan gemericik air sungai.

Pernak-pernik rumah bertemakan alam juga menghiasi rumah Yanto, seperti benda-benda yang terbuat dari kayu dan elemen hias keramik yang berbentuk daun, tangkai, atau binatang yang sering berkeliaran di sekitar rumah. Yanto juga memberi aksentuasi alam pada rumahnya dengan rangkaian tangkai dan daun pohon rotan, jali, dan rumput gajah. Si empunya rumah memang tuntas membangun harmoni dengan alam. ▣



Tekan Bujet, Tekan Dompot?



►► BEBERAPA waktu lalu, seorang bankir yang cukup senior berujar, "Kalau Anda punya banyak uang, sekarang waktunya belanja." Nah, *lo!* Bukankah kita sekarang tengah dilanda krisis global? Benar, krisis global memang tengah merangsek ke hampir semua negara, termasuk republik tercinta ini.

Hanya, bobot dan intensitasnya berbeda. Efek samping krisis, seperti pengurangan ekspansi, produksi, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penutupan perusahaan (likuidasi), pun belakangan makin santer terdengar. Media massa gencar memberitakannya kepada khalayak. Pelan tapi pasti, efeknya bakal terasa juga di sini.

Sekarang ini, hampir semua negara memang mengalami krisis. Tapi, menurut bankir tersebut, konsumsi dan kegiatan belanja harus tetap berjalan. Dengan begitu, penjualan barang dan jasa tidak bakal merosot tajam, minimal linier. Alhasil, produksi tidak akan menurun, karyawan dan buruh pabrik pun tak bakal banyak yang menganggur. Diharapkan, roda ekonomi *ajek* berjalan seperti biasanya. Tapi, apa

benar begitu? Di lapangan, kenyataan bisa saja berbeda. Wallahuallah.

Namun, banyak kalangan berpendapat bahwa melakukan penghematan di saat krisis dipercaya sebagai langkah yang paling tepat. Istilah sekarang, efisiensi. Pelbagai lembaga negara dan lembaga bisnis di negeri ini pun cukup banyak yang mengambil langkah tersebut. Bahkan, sebelum krisis global menghampiri, pemangku otoritas perbankan di Tanah Air, Bank Indonesia (BI), pun sudah mengobarkan spirit itu.

Di samping efisiensi di *business process*, semangat berhemat juga dilakukan lembaga ini dari sisi bujet. Alhasil, segala bentuk aktivitas yang dinilai membikin dompet cekak bakal dipangkas habis. Tahun ini, spirit efisiensi itu benar-benar akan diwujudkan di segala bidang.

Boleh dibilang, BI sudah memberi teladan yang bijak kepada industri perbankan dan segenap *stakeholders*-nya, yakni melalui spirit berhemat dan efisiensi. Lantas, apa industri perbankan dan para bankir juga perlu menempuh hal yang sama?

Tanpa mengurangi rasa hormat, berhemat di saat krisis memang penting dipertimbangkan. Kendati harga bahan bakar minyak (BBM) sudah diumumkan turun dan diasumsikan bakal diikuti penurunan harga-harga lain, menentukan prioritas kebutuhan harus didahulukan sebelum mengambil tindakan. Kalau memang tidak begitu diperlukan, ada baiknya tak usah dipaksakan. Sejatinya, itu hal yang lumrah.

Tapi, jangan salah, bankir juga manusia. Punya hasrat dan niat membelanjakan fulusnya untuk berbagai barang dan kebutuhan lainnya. Di sisi lain, bankir kerap dinilai banyak kalangan sebagai pihak yang idealnya tahu apa yang mesti dilakukan di saat krisis.

Maklum, informasi tentang bisnis perbankan dan keuangan, seperti suku bunga, pasar uang, pasar modal, investasi, dan inflasi, umumnya ada di genggaman mereka. Nah, setidaknya, dengan informasi tersebut bankir lebih mampu merumuskan prioritas kebutuhannya ketimbang pihak lain. Mereka lebih tahu mana yang dibutuhkan dan mana yang diperlukan.

Tapi, bagaimana praktiknya di lapangan? Mengerem budaya *shopping* memang gampang-gampang susah. Tren dan mode gaya hidup, mulai dari *fashion*, *handphone*, mobil, properti, *leisure*, hingga wisata, senantiasa berganti dari waktu ke waktu. Di titik inilah, maffumnya, konsumsi membengkak hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan mode dan gaya hidup paling mutakhir.

Sebagai golongan ekonomi menengah atas, bankir tentu lekat dengan hal ihwal itu. Kendati begitu, bankir juga perlu bersikap bijak, termasuk menerapkan gaya hidup hemat dan cermat dalam memilah-milah kebutuhan.

Tetap prihatin di saat susah dan tetap sabar di tengah kegembiraan merupakan sikap yang mulia. Nah, seperti halnya BI, bankir pasti juga ingin memberikan teladan yang bijak kepada semua pihak yang ada di sekitarnya. Tentu saja, melalui sikap hemat dan cermat di saat krisis. ■